

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di eraglobalisasi memberi pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Ditandai dengan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang pembangunan infrastruktur. Pada dasarnya ini merupakan proses perubahan menuju kondisi kehidupan yang lebih baik. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti transportasi dan sarana untuk mendapatkan pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya kearah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mutlak menjadi titik perhatian pemerintah, karenadengan berhasilnya pembangunan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia turut ditingkatkan kesejahteraanya.

Pembangunan Desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa/kelurahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintahan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa sekaligus untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Kepala desa sebagai pemimpin formal yang ada di desa, berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan.

Untuk lebih memperluas dan memperlancar proses pekerjaan kepala desa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa "Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Disamping kepemimpinan kepala Desa yang sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan pembangunan, hal lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah partisipasi dari masyarakat desa dalam membantu aparat desa mewujudkan perbaikan infrastruktur desa. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan kegiatan pembangunan berkenaan dengan partisipasi menurut Soetrisno (1995: 222) mengemukakan bahwa “ pemotivasian adalah upaya yang dilakukan oleh pimpinan dalam rangka mengarahkan segala sumber daya dan potensi manusia (tenaga kerja/karyawan) agar dapat bekerja secara produktif, sehingga dapat mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pemotivasian pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara peranan dan rakyat yang merencanakan, menghasilkan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai”.

Pembangunan infrastruktur jalan desa yang sedang berlangsung sekarang ini merupakan pembangunan yang menyeluruh dan merata baik secara material maupun spiritual dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6(enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunanDesa, kebijakan umum, dan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD,dan program prioritas kewilayahan,disertai dengan rencana kerja.

Kabupaten Bandung Barat di susun sebagai landasan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan budaya asing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun.
- b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, untuk jangka 1(satu) tahun.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu pembangunan yang dilakukan di daerah guna menunjang masyarakat umum khususnya masyarakat di Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Bandung Barat diperlukan upaya pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan jalan Desa. Hal tersebut bahwa Desa Jayagiri merupakan suatu daerah yang memiliki akses jalan yang kurang dan tidak memadai, sehingga peneliti memilih untuk dijadikan sebagai bahan di dalam peneliti ini.

Harus kita sadari bahwa pelaksanaan pembangunan sarana fisik ditingkat desa atau kelurahan di daerah-daerah perhatian utama karena disinilah bermukimnya lebih dari 80% penduduk Indonesia yang sekaligus pula sebagai subjek pembangunan. Oleh sebab

itu wajar apabila pembangunan di wilayah Desa di daerah-daerah yang jauh dari kota besar mendapatkan penanganan yang serius dari aparat pemerintah.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam program pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya serta peningkatan kinerja aparat pemerintah yang di implementasikan dalam bentuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dalam hal adalah kinerja para aparat yang ada pada beberapa dinas dan instansi dilingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, termasuk didalamnya aparatur pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa.

Melalui motivasi dapat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan jalan karena di dalam suatu pemotivasian bagi pegawai desa akan mengarahkan pada program yang dapat diselesaikan dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, dengan adanya motivasi dapat memberikan suatu kebutuhan-kebutuhan para pegawai seperti halnya dalam kebutuhan fisik, kebutuhan keselamatan, dan kebutuhan sosial. Dengan demikian bahwa efektivitas di dalam pembangunan jalan desa di desa Jayagiri dapat berjalan efektif dan hal tersebut dikarenakan adanya motivasi yang diberikan sehingga membangkitkan kinerja para pegawai.

Efektivitas aparat yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas yang diberikan. Demikian halnya, efektivitas yang baik, tentunya mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan instansi, serta aparat dan masyarakat. Selain itu pula, efektivitas yang diartikan sebagai keberhasilan melakukan suatu pekerjaan, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tentunya dapat

menentukan efektivitas kerja aparat berhasil dilakukan dengan baik atau tidak. Tugas bawahan dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan pemberitahuan (komunikasi) tentang pendelegasian tugas dan tanggung jawab, motivasi serta adanya evaluasi kerja pimpinan.

Desa Jayagiri sebagai instansi pemerintah yang merupakan bagian unit kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah, tentunya memerlukan aparat yang bisa mewujudkan tujuan organisasi dan menjalankan tugas dan pekerjaannya. Dengan demikian hasil dari pelaksanaan tugas aparat adalah berupa jasa pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dikatakan efektif, apabila aparat berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Sejalan dengan hal tersebut diatas, aparat kecamatan, sebagai birokrat di tingkat kecamatan dituntut untuk mampu menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-usaha pembangunan yang digalakan pemerintah. Aparat Kecamatan harus mampu desa seperti halnya di dalam pembangunan jalan.

Dengan demikian bahwa dengan efektivitas pembangunan jalan yang dilakukan oleh aparat desa untuk konsisten dan tepat sasaran serta jalur mana saja yang bisa dikatakan penting bagi akses-akses jalan yang selalu digunakan dan bisa mempercepat didalam melakukan perjalanan seperti yang diharapkan oleh masyarakat yaitu kebutuhan-kebutuhan yang bisa menunjang aktivitas bagi masyarakat desa Jayagiri.

Desa Jayagiri merupakan salah satu wilayah yang pada saat ini melakukan pelaksanaan program pembangunan jalan desa guna memberikan suatu akses terhadap masyarakat di dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan berbagai kegiatan yang

bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu peranan aparat desa yang merupakan perwakilan dari pemerintah daerah Jawa Barat sangat berperan di dalam memberikan suatu kebutuhan bagi masyarakat dan memiliki kualitas di dalam pelaksanaannya.

Pembangunan infrastruktur jalan yang sudah direncanakan di Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat oleh aparat Pemerintah Desa sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat setempat. Hal tersebut yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa pada Tahun 2016 belum optimal. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada data table 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Jenis pembangunan infrastruktur Jalan Desa Jayagiri
Tahun 2016

No	Tahun	Jenis pembangunan jalan	Kolusi	Rencana	Relalisasi	%
				m ²	m ²	
1	2017	Pengerasan jalan	Rw 01	2300	1400	61%
2	2017	Pengaspalan	Rw 07	2300	1400	61%
3	2017	Kirmir	Rw 10	355	2500	56%
4	2017	Jembatan	Rw 07	170	120	71%
5	2017	Perbaikan jalan pasir ipis	Rw 06	3500	2500	71%

Sumber : Desa Jayagiri 2017

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Jayagiri pada tahun 2017 dalam realisasinya belum sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. Hal tersebut akan menghambat kepada kelancaran transportasi di Desa Jayagiri. Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan peneliti menemukan beberapa indikasi belum efektifnya program pembangunan infrastruktur jalan Desa di Desa Jayagiri sebagai berikut :

1. Realisasi pembangunan jalan Desa belum sesuai dengan rencana.

2. Pengantisipasi mengelola pembangunan jalan desa kurang maksimal.
3. Ada beberapa sarana prasarana yang tidak tersedia dalam proses pembangunan infrastruktur jalan Desa.
4. Kedisiplinan pegawai desa belum maksimal.
5. Tidak semua aparat pelaksana hadir pada saat pelaksana kegiatan.
6. Kurangnya SDM yang mempunyai keahlian dalam kegiatan pembangunan jalan Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menghubungkan dengan salah satu variabel yang mungkin mempengaruhinya yaitu pemotivasian, karena pemotivasian yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa dapat berjalan apabila masyarakat Desa memiliki keinginan yang kuat dalam melaksanakan program pemerintahan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul Pengaruh Pemotivasian Terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (Studi di Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Bandung Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan memberikan arah bagi pembahasan, peneliti mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :Seberapa besar pengaruh pemotivasi terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur jalan Desa Di Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

1.3Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan besarnya Pengaruh Pemotivasian Terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Bandung Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pengaruh Terhadap Efektivitas Pembangunan Infrastruktur JalanDesa Jayagiri Kecamatan Lembang Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pedoman bagi Kepala Desa dan Jajarannya di Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Bandung Barat mengenai motivasi guna efektivitas pembangunan jalan.